

IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN PROGRAM E-STDB DALAM MENDUKUNG LEGALITAS PEKEBUN KELAPA SAWIT DI DESA BUKIT HARAPAN DAN DESA BANGUN JAYA

**Dony Kristian¹⁾, Jessica Anastasya Clara²⁾, Arafat Aljihad³⁾, Widi Gaga Pranatar⁴⁾,
Natasya Rizky Sephiani⁵⁾, Chaelly Angel Christy⁶⁾, Noni Margawari Luhut⁷⁾,
Adelia Viviane⁸⁾, Fahtia Mutmainna⁹⁾, Aliya Safitri¹⁰⁾**

¹⁾ Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman,

²⁾ Program Studi S1 Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman

³⁾ Program Studi S1 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan,
Universitas Mulawarman

⁴⁾ Program Studi S1 Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman,

⁵⁾ Program Studi S1 Perternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman

⁶⁾ Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman

⁷⁾ Program Studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman

⁸⁾ Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman

⁹⁾ Program Studi S1 Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman

¹⁰⁾ Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman,
donykristian@fisip.unmul.ac.id

Abstract

The 2025 Mulawarman University Thematic Community Service Program (KKN) was held in Bukit Harapan Village and Bangun Jaya Village, Kaliorang District, East Kutai Regency, focusing on assisting smallholder oil palm growers in processing Cultivation Registration Certificates (STDB). The STDB is a crucial legal document that provides legal recognition and opens farmers' access to government programs, such as *People's Oil Palm Replanting (PSR), subsidized fertilizer, and formal financing. Implementation methods included initial observation, coordination with village officials and the plantation office, outreach, door-to-door data collection, administrative assistance, land verification, and evaluation. Results showed that, although the number of STDB files successfully processed was still limited, this activity increased community understanding of the importance of land legality and encouraged farmer participation in the data collection process. The main obstacles encountered included time constraints, terrain and weather conditions, incomplete documents, limited transportation facilities, and a crisis of public trust due to previous experiences. Nevertheless, this program makes a real contribution to strengthening the governance of smallholder oil palm plantations by strengthening land legality, while also serving as a learning tool for students in community service.

Keywords: *Farmers 1, Oil palm 2, STDB 3, Land legality 4.*

Abstrak

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Mulawarman tahun 2025 dilaksanakan di Desa Bukit Harapan dan Desa Bangun Jaya, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, dengan fokus pada pendampingan pengurusan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) bagi pekebun kelapa sawit rakyat. STDB merupakan dokumen legalitas yang penting untuk memberikan pengakuan hukum sekaligus membuka akses petani terhadap program pemerintah, seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pupuk subsidi, dan pembiayaan formal. Metode pelaksanaan meliputi observasi awal, koordinasi dengan aparat desa dan dinas perkebunan, sosialisasi, pendataan door to door, pendampingan administrasi, verifikasi lahan, serta evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa meskipun jumlah berkas STDB yang berhasil diproses masih terbatas, kegiatan ini meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas lahan dan mendorong partisipasi petani dalam proses pendataan. Hambatan utama yang ditemui meliputi keterbatasan waktu, kondisi medan dan cuaca, dokumen yang tidak lengkap, keterbatasan sarana

transportasi, serta krisis kepercayaan masyarakat akibat pengalaman sebelumnya. Kendati demikian, program ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola perkebunan sawit rakyat melalui penguatan legalitas lahan, sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat.

Keywords: Petani 1, Kelapa Sawit 2, STDB 3, Legalitas Lahan 4.

PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan komoditi dengan jumlah produksi sekaligus pertumbuhan produksi terbesar di antara komoditi unggulan perkebunan di Indonesia (Direktorat Jendral Perkebunan dalam Hermansyah, 2024). Secara keseluruhan produktivitas kelapa sawit Indonesia tahun 2003 - 2009 naik sebesar 3,00 persen per tahun, dimana produktivitas tertinggi dicapai oleh perkebunan swasta sebesar 3,59 ton/ha dan posisi kedua di capai oleh perkebunan negara dengan rata-rata produktivitas sebesar 3,48 ton/ha. Produktivitas perkebunan rakyat merupakan yang paling rendah dengan rata-rata sebesar 2,97 ton/ha. Pada tahun 2005, 35 persen dari total area kelapa sawit Indonesia sebesar sekitar 5,5 juta ha merupakan perkebunan rakyat yang memiliki produksi paling rendah (Puteri, 2013 dalam Hermansyah, 2024).

STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) merupakan layanan administrasi yang fungsinya mencakup pendataan statistik, syarat PSR dan ISPO, akses bantuan, transparansi data dan traceability. Namun hingga kini banyak pekebun sawit rakyat masih menghadapi kendala dalam hal legalitas lahan dan pendataan resmi oleh pemerintah. Penerbitan Surat tanda daftar usaha budidaya tanaman perkebunan (STD-B) merupakan wewenang dari kepala daerah (Bupati/Walikota) dan tidak termasuk

dalam kategori perizinan. Dokumen ini ditunjukan bagi petani yang memiliki lahan kurang dari 25 ha dan tidak dikenakan biaya untuk pengurusannya. Meskipun lahan merupakan suberdaya alam yang dapat diperbaharui, namun keterbatasan jumlahnya menjadikan lahan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, ketidak setaraan dalam kepemilikan lahan semakin meningkat. Ketimpangan dalam sumber daya lahan dapat mengakibatkan domisili pemilik lahan dalam masyarakat (Riyono, A. 2022 dalam Bandrang, dkk 2024).

E-STDB (Elektronik-Surat Tanda Daftar Budidaya) merupakan sistem yang dirancang untuk mengelola informasi terkait kebun dan usaha tani secara digital (EFI 2024c). E-STDB dapat menjadi salah satu bukti administrasi legal untuk mendorong peningkatan mutu tanaman karena mencantumkan posisi lahan pekebun, kualitas benih sampai pada Policy Brief | Strategi Perkebunan Indonesia Dalam Menghadapi 927 European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR) hasil panen (Afandi, dkk 2024).

Melalui KKN Tematik Universitas Mulawarman, mahasiswa hadir sebagai fasilitator dan pendamping masyarakat desa dalam pengurusan STDB. Kegiatan ini berperan penting dalam menjembatani kesenjangan informasi antara petani dan pemerintah, serta memastikan petani dapat memperoleh manfaat nyata dari

kebijakan legalisasi lahan perkebunan. Dengan demikian, KKN tidak hanya menjadi tempat pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan tata kelola perkebunan sawit rakyat di tingkat desa. Adapun mitra yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur, Kelompok Tani dan Pekebun Sawit Aparat RT dan tokoh masyarakat dari Desa Bukit Harapan dan Desa Bangun Jaya.

METODE

Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi awal dilakukan dengan mengumpulkan informasi langsung dari aparat desa sebagai sumber data utama. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pekebun mengenai Sertifikat Tanah dan Dokumen Legalitas Berkebun (STDB) serta kondisi mereka terkait pengelolaan dokumen tersebut.

2. Koordinasi

Koordinasi dilakukan untuk menyepakati aspek teknis terkait pelaksanaan pendampingan dan pengumpulan data.

3. Sosialisasi

Kegiatan ini bertujuan untuk menekankan pentingnya STDB sebagai dokumen legalitas yang tidak hanya mendaftarkan pekebun, tetapi juga menjadi syarat akses program pemerintah.

4. Pendataan

Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pendataan langsung ke rumah pekebun menghasilkan 143 responden. Data yang dihimpun meliputi identitas pribadi, luas lahan, status kepemilikan, serta dokumen pendukung.

5. Verifikasi lahan

Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data pemilik lahan dan batas-batas lahan sesuai dengan dokumen yang telah disiapkan, termasuk peta digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama 38 hari pelaksanaan KKN Tematik di Desa Bukit Harapan dan Desa Bangun Jaya, kegiatan difokuskan pada pendampingan pengelolaan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) bagi pekebun kelapa sawit rakyat. Berdasarkan pendataan door to door, terdapat sebanyak 143 pekebun, terdiri atas 78 pekebun di Desa Bukit Harapan dan 65 pekebun di Desa Bangun Jaya. Sebagian besar pekebun telah memiliki dokumen pendukung, meskipun masih terdapat yang belum lengkap. Hasil kegiatan selanjutnya dianalisis berdasarkan tahapan pelaksanaan, meliputi observasi, koordinasi, sosialisasi, pendataan, hingga verifikasi lahan.

Observasi Awal

Observasi awal meliputi penggalan informasi dari aparat desa. Informasi menunjukkan bahwa sebagian besar pekebun belum memahami manfaat STDB dan belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait prosedur pengurusannya. Hal ini memperlihatkan bahwa rendahnya kepemilikan dokumen legalitas bukan hanya karena minimnya pengetahuan, tetapi juga keterbatasan akses pelayanan administrasi. Kondisi serupa juga ditemukan oleh Hermansyah (2024) yang menekankan perlunya pendampingan teknis agar petani swadaya mampu memenuhi persyaratan administratif STDB, serta Heriyanto et al. (2024) yang menyebutkan bahwa peningkatan kapasitas administratif menjadi faktor

kunci bagi pekebun swadaya untuk memenuhi kewajiban legalitas.



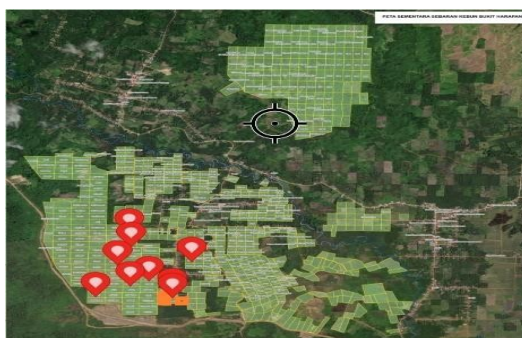
Gambar 1. Penggalan Informasi dengan Aparat Desa

Koordinasi dengan Aparat Desa

Koordinasi menghasilkan kesepakatan teknis terkait prosedur pendampingan dan pengambilan data, di mana aparat desa membantu menyiapkan data warga pemilik lahan serta peta batas lahan berbasis digital. Aparat desa juga mengumpulkan ketua kelompok tani untuk mengikuti sosialisasi agar informasi dapat diteruskan kepada anggotanya, serta menginstruksikan setiap ketua RT untuk mendampingi mahasiswa dalam proses pendataan.



Gambar 2. Rapat Koordinasi dengan pihak Desa



Gambar 3. Peta Batas Lahan

Sosialisasi STDB

Kegiatan sosialisasi diikuti oleh kurang lebih 15 pekebun dalam setiap forum pertemuan RT. Sosialisasi ini menekankan pentingnya STDB sebagai dokumen legalitas yang tidak hanya mendata pekebun, tetapi juga menjadi syarat akses program pemerintah. Hal ini sejalan dengan praktik serupa di daerah lain, misalnya di Desa Sumber Agung, Lampung, di mana sosialisasi STDB ditekankan sebagai kunci untuk membuka akses bantuan dan meningkatkan legalitas usaha budidaya sawit (Sumber Agung, 2024). Respon masyarakat pada kegiatan ini positif, terlihat dari meningkatnya jumlah pekebun yang menyatakan minat untuk melengkapi berkas setelah kegiatan berlangsung.



Gambar 4. Sosialisasi STDB

Pendataan Door to Door

Pendataan langsung ke rumah pekebun menghasilkan 143 responden. Dari jumlah tersebut, 125 pekebun tercatat memiliki dokumen yang relatif lengkap, sedangkan 18 pekebun lainnya masih belum memenuhi persyaratan administrasi. Data yang dihimpun meliputi identitas pribadi, luas lahan, status kepemilikan, serta dokumen pendukung. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pekebun sudah memiliki kelengkapan berkas, masih terdapat kelompok yang memerlukan pendampingan lebih lanjut.



Gambar 5. Wawancara Door to Door

Verifikasi Lahan

Verifikasi lapangan berhasil dilakukan pada 49 lahan pekebun, sedangkan 94 lahan tidak dapat diverifikasi karena kendala cuaca, akses jalan, dan keterbatasan waktu. Hasil verifikasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara dokumen dengan kondisi aktual, seperti perbedaan luas lahan maupun informasi yang disampaikan oleh pekebun. Hal ini menegaskan bahwa proses legalisasi STDB membutuhkan waktu yang lebih panjang dan dukungan administratif berlapis.



Gambar 6. Verifikasi Lahan Sawit

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan pengurusan STDB di Desa Bukit Harapan dan Desa Bangun Jaya berhasil meningkatkan pemahaman pekebun mengenai pentingnya legalitas lahan. Dari jumlah data 143 pekebun, terdiri atas 78 pekebun di Desa Bukit Harapan dan 65 pekebun di Desa Bangun Jaya, sebanyak 125 orang telah memiliki dokumen yang lengkap, sementara sisanya masih membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Hambatan

utama yang ditemui meliputi keterbatasan kelengkapan berkas, kondisi medan, serta keterbatasan waktu pelaksanaan. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi STDB di tingkat desa memerlukan dukungan kelembagaan dan pendampingan jangka panjang agar dapat terlaksana secara optimal, sebagaimana juga ditekankan oleh Bandrang, Linda, & Triwandoyo (2024) bahwa kesiapan petani sangat dipengaruhi oleh akses informasi dan bimbingan berkesinambungan.

Gambar 7. Hasil Pendataan di Desa Bukit Harapan

Gambar 8. Hasil Pendataan di Desa Bangun Jaya

SIMPULAN

Program KKN Tematik yang difokuskan pada pendampingan pengurusan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) di Desa Bukit Harapan dan Desa Bangun Jaya berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas lahan perkebunan sawit rakyat. Dari total 143 pekebun yang terdata, sebanyak 125 orang sudah memiliki dokumen pendukung yang relatif lengkap,

sementara 18 orang lainnya masih memerlukan bimbingan lebih lanjut.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa keterlibatan aparat desa, ketua RT, dan kelompok tani berperan penting dalam memperlancar pendataan, sosialisasi, serta proses verifikasi. Meski demikian, pelaksanaan menghadapi kendala berupa keterbatasan dokumen, kondisi medan, cuaca, dan waktu. Oleh karena itu, pendampingan jangka panjang dan dukungan kelembagaan dari pemerintah maupun desa sangat dibutuhkan agar implementasi STDB dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi pekebun sawit rakyat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada Universitas Mulawarman dan LPPM yang telah memberikan dalam melaksanakan kegiatan KKN, Pemerintah Desa Bukit Harapan dan Desa Bangun Jaya beserta jajaran perangkatnya yang telah menerima, mendukung, dan membantu dalam setiap kegiatan, Dinas Perkebunan dan Tim Solidaridad yang turut memberikan arahan serta informasi terkait program kerja yang dilaksanakan serta Seluruh masyarakat desa yang dengan tulus memberikan bantuan, kerjasama, serta dukungan selama kegiatan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, F., & Suryaningtyas, P. 2024. Strategi Perkebunan Indonesia dalam Menghadapi EUDR.

Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika, 6(3), 922-928.

Bandrang, T. N., Linda, L., & Triwandoyo, D. 2024. Respon Petani Kelapa Sawit Mandiri Terhadap Pertanian Berkelanjutan Pada Penerapan Std-B. Indonesian Journal of Mathematics, Science dan Education Mathematics, Science, 2(2), 113-128.

Hermansyah, H. 2024. Pendampingan Pembuatan Surat Tanda Daftar Budidaya Bagi Petani Swadaya Di Desa Terawan Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Agri Hatantiring, 3(2), 1-5.

Heriyanto, M., Ikhsan, M., Rifai, A., Fermi, M. I., Vio Vani, R., & Rahmanul, R. 2024. Pemberdayaan usahani perkebunan kelapa sawit bagi petani swadaya. CDJ: Cooperative Development Journal, Universitas Riau.

Sumber Agung Digital Desa. 2024. Sosialisasi penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) di Desa Sumber Agung. Retrieved from <https://sumberagung.digitaldesa.id>.